

PENDIDIKAN MORAL DI MALAYSIA: TANTANGAN DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH

Bambang Sumintono, Lokman Mohd Tahir, Mohd Anuar Abdul Rahman
Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
email: bambang@utm.my

Abstrak: Bentuk pendidikan karakter di sekolah di Malaysia sudah dilaksanakan sejak sekolah formal dimulai pada jaman penjajahan Inggris. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat membawa perubahan struktur masyarakat dan perilakunya yang membuat pendidikan moral sebagai pelajaran wajib untuk mengantisipasi perubahan sosial dan merupakan implementasi pendidikan karakter di sekolah bagi siswa non-Muslim. Mulai 1980-an diperkenalkan enam belas nilai murni yang harus dipahami siswa dan menjadi tema pokok bagi guru yang diterapkan dalam berbagai pelajaran dan aspek kehidupan. Berbagai tantangan dihadapi siswa dan guru dalam pembelajaran pendidikan karakter ini, mulai metoda pengajaran oleh guru di kelas, pembelajaran oleh siswa yang monoton dan lebih banyak menghafal, serta pola evaluasi yang diterapkan berhubung kompleksitas sistem nilai yang diujikan tidak selalu mudah disepakati bersama.

Kata Kunci: *pendidikan moral, pendidikan karakter, nilai, pendidikan Malaysia*

MORAL EDUCATION IN MALAYSIA: CHALLENGES AND IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION AT SCHOOLS

Abstract: Character education in Malaysian schools has been implemented since the formal school began in British colonial era. Malaysia's rapid economic growth has brought changes in the social structure and people's behavior that makes moral education a compulsory school subject in anticipation of social changes, and it is the implementation of character education at schools for non-Muslim students. From the 1980s Malaysian government introduced sixteen core values that must be understood by the students and it has become the main themes for teachers to apply in various subjects and aspects of life. There are some challenges faced by the students and teachers in the teaching and learning process of character education program, such as teaching methods in the classroom, learning strategies applied by the students with much memorization, and the learning evaluation patterns applied due to the complexity of value system to be examined which is not always easily agreeable to all.

Keywords: *moral education, character education, values, Malaysian education*

PENDAHULUAN

Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang mengalami perkembangan drastis dalam tiga dekade terakhir karena tulang punggung perkembangan ekonomi telah berubah dari pertanian ke industri-manufaktur dan sekarang hendak menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Suatu yang tidak terhindarkan adalah adanya perubahan sosial

dalam struktur masyarakat karena urbanisasi dan perubahan struktur ekonomi dapat membawa dampak negatif, seperti peningkatan kriminalitas, penggunaan obat terlarang dan narkoba, pergaulan bebas dan perubahan perilaku yang tidak konstruktif dalam sistem nilai masyarakat. Cara utama yang dilakukan oleh pemerintah di Malaysia dalam hal ini adalah melibatkan sekolah dalam mencoba me-

nangani dampak negatif perubahan sosial. Pendidikan moral adalah jawabannya, yang menjadi pelajaran wajib bagi semua murid sekolah di Malaysia. Strategi ini tidak lain sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan juga menghargai serta mengaplikasikan nilai dan moral dalam kehidupan pribadi.

Kurikulum pendidikan sekolah di Malaysia saat ini membagi pendidikan moral dalam dua bentuk yang berbeda. Pendidikan Agama Islam untuk siswa muslim dan Pendidikan Moral bagi siswa nonmuslim yang merupakan 40% dari total populasi pendidikan Malaysia (Banks, 1993; Vishalache, 2009). Pendidikan moral ini bisa dikatakan sebagai bentuk nyata pendidikan karakter yang ingin ditanamkan pada generasi muda Malaysia, yang merupakan perkembangan yang terus berlangsung sejak sekolah formal diperkenalkan oleh Inggris (Rahimah, 1998).

Tulisan ini membahas perkembangan pendidikan moral sebagai pengejawantahan pendidikan karakter dalam sistem sekolah di Malaysia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan meneliti dan menganalisis berbagai artikel yang relevan dengan konteks pendidikan moral di Malaysia. Perkembangan dari sisi historis, isi silabus, maupun tantangan dan peluang pelaksanaannya di kelas dijelaskan. Berbagai riset dalam konteks ini diketengahkan yang menunjukkan realitas dan kompleksitas pendidikan karakter yang umum terjadi di negara berkembang. Pembahasan tulisan dimulai dengan ringkasan tentang perkembangan pendidikan Malaysia sampai pada kondisi aktual yang ada.

SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Menurut Bajunid (2004), pendidikan formal di Malaysia dimulai pada tahun

1816 dengan berdirinya *Penang Free School* di Pulau Penang. Sekolah-sekolah lain kemudian didirikan oleh pemerintah kolonial Inggris di wilayah Semenanjung, seperti di Malaka dan Singapura yang meluas sampai di Sabah dan Sarawak. Setelah Malaysia mendapatkan kemerdekaan tahun 1957, sistem pendidikan model Inggris terus dipertahankan dan mengalami perubahan secara bertahap sesuai dengan amanat dari pemberlakuan undang-undang pendidikan tahun 1961 (Rahimah, 1998). Malaysia merupakan negara multi-etnis dengan total populasi pada tahun 2010 sebanyak 27 juta jiwa. Komposisi penduduknya 50% etnis Melayu, etnis Cina (24%), suku asli (11%), India (7%) dan lainnya (7%). Proporsi penganut agama, mayoritas adalah Muslim (60%), diikuti penganut Budha (20%), Kristen (9%), Hindu (6%) dan sisanya adalah Konghucu, Tao, dan penganut animisme (Anonymous, 2012).

Sistem sekolah Malaysia mengalami ekspansi yang sangat besar dan cepat pada dekade 1960-an, yang ditandai dengan banyak dibukanya lembaga pendidikan keguruan dan tingginya rekrutmen guru (Lee, 2004). Adanya kerusuhan etnis pada 1969 membuat Pemerintah Malaysia melancarkan Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy*) yang salah satunya memberikan akses lebih luas kepada kaum bumiputera dalam pendidikan (Bajunid, 2008). Selesaiannya konfrontasi dengan Indonesia pada akhir 1960-an menyebabkan banyak guru dari Indonesia, khususnya dalam pelajaran matematika dan sains direkrut untuk mendidik kaum bumiputera karena kesamaan bahasa pengantar untuk menanggapi kebutuhan guru yang ada.

Pendidikan di Malaysia sejak zaman kolonial sampai sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat

(federal) yang diketuai oleh Menteri Pe-
lajaran. Secara tradisional, sistem sekolah
berdasarkan pola 6-5-2(1)-4 tahun; yaitu
terdapat enam tahun pendidikan rendah
(dasar), dilanjutkan dengan lima tahun
pendidikan menengah (yang setara dengan
O level di Inggris), kedua tingkatan ini
adalah pendidikan wajib bagi seluruh
warga Malaysia; setelah itu siswa yang
mempunyai prestasi cemerlang bisa meng-
ikuti pendidikan pra universitas selama
dua tahun (atau satu tahun pendidikan
matrikulasi) untuk terus mengikuti empat
tahun masa pendidikan universitas (strata
1). Pada saat ini, total terdapat 5,3 juta
siswa yang terdaftar pada 10 ribu lebih
sekolah rendah dan menengah di tiga belas
negara bagian dan tiga daerah federal yang
sebesar 43% (2,296 juta jiwa) adalah siswa
sekolah menengah (tahun 7-11). Sistem
pendidikan Malaysia mempekerjakan
empat ratus ribu lebih guru yang mengajar
di tingkat sekolah dasar dan menengah,
sebesar 69% adalah guru perempuan (MoE,
2011).

Seperti halnya yang terjadi di negara
berkembang, Kementerian Pengajaran Ma-
laysialah yang memulai berbagai inisiatif
kebijakan dan implementasinya pada sis-
tem sekolah, mulai dari kurikulum, sistem
penilaian, rekrutmen guru dan berbagai
standar lain yang ditetapkan (Rideout &
Ural, 1993). Misalnya, pada akhir 1970-an
terdapat perubahan penting dari segi kuri-
kulum, yaitu semua sekolah yang ada
akhirnya menggunakan Bahasa Malaysia
sebagai bahasa pengantar (kecuali untuk
sekolah tingkat dasar seperti yang diper-
bolehkan oleh undang-undang pendidik-
an) (Rahimah, 1998); pihak pemerintah
pusat juga memberlakukan kebijakan inte-
grasi teknologi informasi pada berbagai se-
kolah di Malaysia mulai dari pembelajaran
sampai sistem administrasinya yang di-

kenal dengan program *Smart School* sejak
1998 (Abdullah, 2006; Puteh & Vicziany,
2004); dalam hal bahasa pengantar, pada
tahun mulai 2003 diterapkan kebijakan
pengajaran matematika dan sains dengan
bahasa Inggris untuk semua jenjang se-
kolah di Malaysia, tetapi kemudian ke-
bijakan ini ditarik kembali dan pengajaran
dikembalikan ke Bahasa Malaysia pada
tahun 2012 ini (Sumintono, 2010).

Dalam hal pendidikan moral dan
nilai, kementerian pengajaran menjadikan
sebagai suatu bagian yang tidak terpisah-
kan dalam kurikulum baru pada tingkat
sekolah dasar dan menengah mulai tahun
1980-an. Kemunculan undang-undang/-
akta pendidikan yang baru tahun 1996
menjelaskan bahwa falsafah pendidikan
kebangsaan mengintegrasikan hal tersebut
(Bajunid, 2008), yang bertujuan untuk
membentuk manusia Malaysia yang me-
nyeluruh dari berbagai segi, seperti ter-
muat dalam akta, "Pendidikan di Malaysia
adalah satu usaha berterusan ke arah mem-
perkembangkan lagi potensi individu se-
cara menyeluruh dan bersepadu untuk
mengwujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani,
intelektual dan sosial berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampil-
an, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara".

Kemunculan falsafah pendidikan ini
tidak terelakkan lagi membawa implikasi
perlunya pendekatan baru dalam hal pen-
didikan karakter yang harus menjadikan
hal ini inklusif dalam pengajaran di se-
kolah sesuai kurikulum yang berlaku.

PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAH MALAYSIA

Pendidikan moral dan pendidikan nilai adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan yang berlaku di Malaysia. Pada masa awal pendidikan formal di era kolonial, pendidikan moral diberikan dalam bentuk pengajaran alkitab, yaitu mata pelajaran yang diberikan di tingkat sekolah menengah khusus untuk murid beragama Kristen. Untuk murid yang non-Kristen setiap minggunya diberikan pelajaran etika disertai dengan ringkasan secara bebas dari kitab injil serta penekanan bagaimana menjadi seorang yang baik (Mukherjee, 1983).

Setelah Malaysia merdeka, pola yang sama diterapkan, hanya pengajaran alkitab berubah menjadi pengajaran agama Islam karena Islam adalah agama resmi Negara Malaysia, dan hal itu diberikan hanya kepada murid muslim saja. Untuk penganut agama lain yang dijamin oleh konstitusi, pelajaran agama Islam tidak boleh dipaksakan, demikian juga pengajaran etika Islam dalam pembelajaran. Jalan keluarnya adalah seperti yang dirintis oleh Inggris sebelumnya, diperkenalkan pelajaran moral atau pendidikan nilai dalam pembelajaran di kelas (Rahimah, 1998).

Untuk mengisi kekosongan pendidikan karakter bagi siswa nonmuslim, menurut Rahimah (1998) pada awal tahun 1970-an mata pelajaran kewarganegaraan diperkenalkan sebagai pelajaran wajib untuk semua murid yang nonmuslim. Karena pelajaran ini tidak diujikan dalam ujian akhir, dianggap tidak efektif sehingga sekolah tidak menanggapi penting dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan orientasi pendidikan yang masih menekankan pada ujian, berbeda dengan pelajaran agama Islam yang memang diujikan.

Berdasarkan kajian yang mendalam tentang sistem pendidikan Malaysia yang diketuai oleh Dr. Mahathir sebagai Menteri Pengajaran pada saat itu, terbitlah Laporan Kabinet 1979 yang menjadi peletak perubahan mendasar pendidikan di Malaysia (Rahimah, 1998; Vishalache, 2009). Laporan Kabinet memutuskan perlunya Pendidikan Moral diajarkan bagi siswa nonmuslim dan diakomodasikan dalam kurikulum baru sekolah dasar pada tahun 1983, sedangkan untuk sekolah menengah dimulai enam tahun kemudian dengan penerapan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Pelajaran moral diberikan secara bertahap mulai tahun kesatu pada siswa sekolah dasar dan menengah. Tahun 1993 adalah gelombang pertama siswa Malaysia yang terdidik dengan Pendidikan Moral (Vishalache, 2010). Penetapan utama yang ada dalam pelajaran moral ini adalah siswa nonmuslim diharuskan untuk belajar pendidikan moral yang diberikan bersamaan waktunya pada saat siswa muslim belajar Pendidikan Agama Islam, serta termasuk dalam mata pelajaran yang diujikan.

Pusat Pengembangan Kurikulum di Kementerian Pengajaran Malaysia kemudian mengembangkan isi kurikulum pendidikan moral yang harus merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Malaysia. Pada awalnya, pendidikan moral menekankan aspek-aspek spiritual, kemanusiaan dan sosial masyarakat majemuk Malaysia yang harus dipahami oleh siswa. Namun, wujudnya kemudian berubah menjadi penentuan nilai-nilai utama yang bisa diterima serta harus disetujui oleh berbagai kelompok penganut agama yang ada (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Tao dan lainnya) dan kelompok masyarakat tradisional lainnya yang tidak menganut agama secara formal. Suatu

komite dibentuk untuk merumuskan seperti apa silabus pendidikan moral yang akan diajarkan kepada siswa nonmuslin tersebut. Akhirnya, ditetapkan enam belas buah nilai utama (yang disebut sebagai 'nilai murni') yang disetujui, yaitu: (1) baik hati; (2) berdikari; (3) hemah tinggi (sopan-santun); (4) hormat-menghormati; (5) kasih sayang; (6) keadilan; (7) kebebasan; (8) keberanian; (9) kebersihan fizikal dan mental; (10) kejujuran; (11) kerajinan; 12) kerjasama; (13) kesederhanaan; (14) kesyukuran; (15) rasional; dan (16) semangat bermasyarakat (gotong royong) (Chew, 2010:3).

'Nilai-nilai murni' tersebut diturunkan dari nilai-nilai agama, tradisi, kebiasaan masyarakat yang ada di samping juga mempertimbangkan aspek universal (Rahimah, 1998). Semua nilai tersebut berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, hubungan antara manusia dalam keluarga, teman sejawat, masyarakat ataupun organisasi.

Silabus pendidikan moral tidak menempatkan hirarki nilai-nilai murni ataupun urutannya bila diajarkan. Keenambelas nilai murni tersebut harus diajarkan kepada siswa sehingga akan terus memahami dan tertanam dalam diri mereka. Tentu saja lingkup dan kedalaman yang diberikan bergantung kepada tingkatan kelas dan kedewasaannya siswa (Rahimah, 1998). Rahman dan Chang (1994) menyatakan bahwa pendidikan moral dilakukan melalui interaksi dalam sekolah (secara klasikal di dalam kelas) maupun luar sekolah, yang tidak lain bermaksud memberikan situasi yang membantu pelajar untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ujian mata pelajaran moral, Vishalache (2010) menyatakan dinamikanya tersendiri. Berhubung moralitas bersifat subjektif, penilaian secara objektif menjadi tantangan yang berkelanjutan dan

seolah tidak berakhir. Setelah berbagai revisi sistem pengujian, akhirnya penilaian dilakukan dalam dua aspek, yaitu pengetahuan secara tertulis dan kerja praktek, yaitu aktivitas siswa dalam domain fisik dan afektif.

IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

Implementasi pendidikan karakter dalam pelaksanaan pendidikan moral di Malaysia menunjukkan perkembangan yang beragam. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis mulai dari aspek isi, pelaksanaan maupun dampaknya (misalnya: Zarin, 1990; Banks, 1993; Rahimah, 1998; Vishalache, 2009, 2010) yang menunjukkan realitas dan kompleksitas tersendiri.

Pendidikan moral yang mengajarkan nilai-nilai murni seperti yang ditekankan oleh kurikulum di kelas lebih banyak dilakukan dengan pengajaran secara langsung (*direct teaching*), yang pada saat yang sama juga nilai-nilai tersebut harus diintegrasikan dalam mata pelajaran lain (Zarin, 1990; Rahimah, 1998; Vishalache, 2009). Hal ini tentu menjadi hal yang membebani, khususnya bagi guru karena pada saat yang sama dituntut menjadi teladan (*role model*). Bila ini dilaksanakan oleh semua guru mata pelajaran, ia menjadi hal yang potensial membingungkan bagi murid. Pengajaran nilai moral sebagai bentuk pendidikan karakter sudah lama diketahui merupakan suatu proses yang kompleks (Huffman, 1993; Ryan, 1993). Apalagi dalam konteks multikultur Malaysia yang seharusnya hal ini lebih cocok diberikan dalam semangat supaya pada akhirnya siswa mampu berpikir secara mandiri dan mendapatkan kesimpulan nilai moral yang tidak bertentangan dengan kepercayaannya (Rahimah, 1998).

Kompleksitas situasi ini juga dinyatakan oleh Vishalache (2010), tantangan utama pelajaran moral di sekolah adalah pengajaran oleh guru dalam kelas. Secara lebih khusus, Zarin (1990) menjelaskan hambatan yang dialami oleh guru seperti kurangnya buku latihan, tidak tersedianya dana untuk kegiatan di luar sekolah dan kurangnya guru spesialis dalam bidang pendidikan moral dan pendidikan karakter. Poin terakhir ini memang sebuah realita bahwa pendidikan guru pendidikan moral memang tidak tersedia dalam jumlah banyak, sehingga guru mata pelajaran lain pun diserahi tanggung jawab untuk mengajar dengan persiapan melalui kursus singkat. Hal ini membawa dampak karena ternyata guru hasil kursus singkat tidak memahami dengan baik istilah-istilah dalam pendidikan moral dengan tingkat pemahaman yang biasa. Dengan demikian, kualitas pendidikan karakter kurang efektif sehingga tidak aneh metoda mengajar yang dilakukan pun sangat sederhana: murid disuruh menghafal (Zarin, 1990).

Lebih jauh Vishalache (2009) mengatakan karena sistem pembelajaran pendidikan moral yang diberikan bersifat statis, terkotak-kotak dan mudah diketahui isinya sehingga tidak memberikan tantangan bagi siswa dan justru menganggap sebagai satu pelajaran yang membosankan. Pada saat yang sama, klarifikasi nilai dan perkembangan kognitif siswa dengan beragam latar belakang selayaknya menjadi sumber rujukan yang kaya untuk diketengahkan (Lickona, 1993). Suatu ilustrasi yang menunjukkan hal ini diberikan oleh seorang siswa melalui blog-nya tentang pengalaman dalam pendidikan moral (Anonymous, 2006). Dalam soal latihan pendidikan moral tingkat sekolah menengah, siswa ditanya mengenai apa yang harus dilakukan bila dalam perjalanan dengan mobil

secara tidak sengaja menabrak seekor ayam di jalanan kampung. Jawaban siswa adalah meminta maaf kepada pemilik ayam dan memberi ganti rugi yang sesuai. Namun, jawaban tersebut tidak mempunyai nilai karena kunci jawaban yang diberikan oleh guru berbeda, yaitu tetap melanjutkan perjalanan dan hati-hati dalam mengemudi. Bila ditanyakan lebih lanjut, guru beralasan bahwa mungkin kunci jawaban tidak tepat, namun jawaban itu harus dihapalkan supaya nanti tidak gagal dalam ujian akhir. Kondisi ini tentu memberikan umpan balik negatif bagi siswa tentang maksud dan tujuan dari pendidikan karakter yang ingin ditanamkan pada mereka.

Dalam hal pengajaran 'nilai-nilai murni' sebagai bentuk pendidikan moral di sekolah, kritik yang sama pernah dikemukakan oleh Leming (1993) dalam konteks pendidikan karakter di sekolah di Amerika Serikat. Pendidikan yang berpatokan pada nilai-nilai tertentu yang telah ditetapkan untuk diajarkan, ternyata tidak mempunyai efek yang diharapkan pada karakter anak didik. Dalam konteks Malaysia, karena guru tidak tahu bagaimana tepatnya mengaplikasikan hal ini dalam pelajaran dan menyusun skenario pembelajaran yang efektif, yang terjadi adalah memasukkan 'nilai-nilai murni' yang diperkirakan relevan dalam pokok bahasan dan menuliskannya dalam rencana pembelajaran (Norhayati & Siew, 2004; Chew, 2010). Hal ini merupakan jalan keluar yang mudah bagi guru, sekaligus menghindari isu sensitif mengenai nilai moral yang dipahami. Dengan demikian, tidak aneh bila ukuran 'keberhasilan' bagi guru adalah siswa dapat menyebutkan nilai murni yang diberikan (Rahimah, 1998).

Penelitian yang dilakukan oleh Ellen Banks (1993) pada kurikulum pendidikan moral sekolah dasar mendapatkan berbagai

temuan menarik. Terdapat lima buah buku pada sekolah rendah yang dianalisis, yaitu buku pendidikan moral isinya cerita dan ilustrasi nilai-nilai murni dan penjelasannya, serta permasalahan moral yang dihadapi di luar konteks sekolah. Banks (1993) menemukan bahwa cerita yang disajikan di buku-buku pelajaran lebih banyak menokohkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan (pada saat populasi siswa dan siswi di sekolah di Malaysia berimbang), terkadang jumlah ceritanya 1:3 (seperti dalam buku tahun ke-2). Dia menyimpulkan bahwa temuan yang diperoleh menunjukkan kecenderungan seperti halnya teori moral Kohlberg, seperti yang dikritik oleh Giligan karena subjek risetnya mayoritas anak laki-laki. Dalam konteks Malaysia, hal ini terjadi karena penulis buku adalah laki-laki. Hal ini tentu akan membawa konsekuensi pada gender tertentu, yaitu anak perempuan tidak merasa banyak dilibatkan dalam konteks pendidikan karakter.

Temuan lain yang menarik dari riset Banks (1993) adalah walaupun buku pelajaran moral diperuntukkan siswa non-muslim yang artinya bukan etnis Melayu, didapati bahwa mayoritas penulis dan pembuat ilustrasi adalah etnis Melayu. Hal yang tidak terhindarkan adalah walaupun ilustrasi dalam buku menampilkan berbagai etnis yang ada di Malaysia, namun gambar orang Melayu dominan di dalamnya. Menurut Banks (1993), keadaan ini tentu akan menjadi menarik bila keragaman yang ada juga diakomodasi dalam pendidikan agama Islam yang merupakan pendidikan moral yang diperuntukkan bagi siswa muslim.

Vishalache (2009) pada penelitian yang dilakukan memberikan soal dilema moral tentang realita kepada siswa sekolah menengah yang berasal dari berbagai etnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para siswa ternyata mempunyai keprihatinan dalam isu moral dan 'nilai murni' yang justru tidak termasuk dalam kurikulum pendidikan moral. Hasilnya, mereka pun menjadi paham bahwa dilema moral yang diidentifikasi memang berhubungan dan bergantung pada konteks. Siswa juga berhasil mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pilihan moral mereka, seperti budaya, agama, etnisitas, dan aspek sejarah di mana konflik kepentingan terjadi dalam diri mereka sendiri. Tentunya hal ini memberikan alternatif model pengajaran moral dan pendidikan karakter di Malaysia yang lebih efektif dan pada saat yang sama berkontribusi pada toleransi budaya dan pemahaman mereka (Vishalache, 2009).

Isu lain yang perlu menjadi perhatian menurut Rahimah (1998) dalam hal pendidikan moral ini adalah kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Wujud nyata dari pendidikan karakter adalah perilaku yang ditunjukkan dan pesan nonverbal yang tentunya memberikan kesan yang kuat terhadap siswa. Pada saat yang sama, menempatkan guru sebagai teladan juga berimplikasi langsung bahwa dia juga seorang individu dengan berbagai nilai-nilai yang dipahami dan dianutnya (Lickona, 1993; Vishalache, 2009). Isu pengembangan karakter guru dan seperti apa pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah harus menjadi isu sentral dalam pendidikan moral di Malaysia (Rahimah, 1998).

PENUTUP

Pendidikan moral di sekolah di Malaysia mempunyai sejarah yang panjang, dimulai sejak berdirinya pendidikan formal pada abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Inggris sampai pada bentuknya sekarang ini, yang khusus untuk siswa nonmuslim. Perubahan bentuk pendidikan

moral sebagai wujud pendidikan karakter di sekolah mengikuti pola yang disesuaikan dengan perubahan kurikulum yang terjadi, yaitu menjadi pelajaran wajib yang masuk dalam ujian akhir sekolah.

Pendidikan moral yang diberikan kepada siswa sekolah dasar dan menengah silabusnya menekankan pentingnya penerapan enam belas nilai murni yang dianggap cerminan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Malaysia yang multi-kultur. Pengajaran nilai murni tersebut mempunyai tantangan dan implikasi tersendiri dalam sistem sekolah di Malaysia yang berkaitan dengan pola pembelajaran yang diterapkan, isi kurikulum, maupun sistem evaluasi yang dilakukan. Pada saat yang sama, berbagai upaya alternatif pengajaran pendidikan moral sebagai wujud pendidikan karakter juga dilakukan untuk mencari bentuk yang sesuai dengan kondisi dan situasi Malaysia modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima disampaikan kepada sejawat dan berbagai pihak yang membantu penulisan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik lewat diskusi maupun berbagai bentuk yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A.T.S. 2006. "Deconstructing Secondary Education: The Malaysian Smart School Initiative". *10th SEAMEO Innotech Conference*. Pear Hall 15-17 November 2006.

Abdul Rahman Md Aroff & Chang Lee Hoon. 1994. *Pendidikan Moral*, Selangor : Longman Malaysia.

Anonimous. 2006. "Moral Education in Malaysia" [http://www.eelengchang-](http://www.eelengchang.com/2006/08/moral-education-in-malaysia.html)

[com/2006/08/moral-education-in-malaysia.html](http://www.eelengchang.com/2006/08/moral-education-in-malaysia.html). (diunduh 20 Feb 2012).

Anonimous. 2012. *CIA The World Fact Book*.

Bajunid, I. A. 2004. "Profesional Development of School Principal for Revitalizing Schooling in Malaysia. In Yin, C. C., King, W. C. and MOK, M.M.C". *Reform of Teacher Education in the Asia-Pacific in the New Millennium*. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Bajunid, I.A. (ed.). 2008. *Malaysia, from Traditional to Smart School; the Malaysian Educational Odyssey*. Shah Alam: Oxford-Fajar.

Banks, E. C. 1993. "Moral Education in a Multicultural Context: The Malaysian Primary Curriculum". *Paper presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development*, New Orleans, 25-28 March 1993.

Chew F. P. 2010. "Penerapan Nilai-nilai Murni Menerusi KOMSAS dalam Sistem Pendidikan Malaysia", *Sosio-humanika*. Volume 3, Nomor 1, hlm. 123-142.

Huffman, H. A. 1993. "Character Education without Turmoil". *Educational Leadership*. Vol. 51 No. 3 pp 24-26.

Lickona, T. 1993. "The return of Character Education". *Educational Leadership*. Vol. 51 No. 3 pp 6-11.

Lee M.N.N. 2004. "Malaysian Teacher Education Into The New Century. In Yin, C. C., King, W. C. and MOK, M.M.C+. *Reform of Teacher Education in the Asia-Pacific in the New Mille-*

- nium*. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Leming, J. S. 1993. "In Search of Effective Character Education". *Educational Leadership*. Volume 51, Nomor. 3, hlm. 63-71.
- MoE or Ministry of Education. 2011. "Education Statistic" Available at: <http://www.moe.gov.my/?lang=en> (diunduh 13 June 2011).
- Mukherjee, H. 1983. "Moral Education in a Plural Society: Malaysia". *Journal of Moral Education*. 12(2), 125–130.
- Norhayati A. M. and Siew P. H. 2004. "Malaysian Perspective: Designing Interactive Multimedia Learning Environment for Moral Values Education". *Educational Technology & Society*, 7 (4), 143-152.
- Puteh, M. and Vicziany, A.M. 2004. "How Smart are Malaysia's Smart Schools?" *SEAMEO Conference Bangkok, Thailand* 5-9 July 2004.
- Rahimah H A. 1998. "Educational Development and Reformation in Malaysia: Past, Present and Future". *Journal of Educational Administration*. Vol. 36 No. 5 pp 462-475.
- Rideout, W. M. And Ural, I. 1993. *Centralised and Decentralised of Education: Comparative Studies*. Development Bank of Southern Africa – Centre for Policy Analysis: South Africa.
- Ryan, K. 1993. "Mining the Values in the Curriculum". *Educational Leadership*. Volumel 5, Nomor 3, hlm. 16-18.
- Sumintono, B. 2010. "Cerita Pengajaran MIPA dengan English di Malaysia" <http://deceng2.wordpress.com/20-10/08/11/cerita-pengajaran-mipa-dengan-english-di-malaysia> (diunduh 15 Feb 2012).
- Vishalache, B. 2009. *Teaching Moral Education in Secondary Schools Using Real life Dilemmas*. Unpublished PhD Thesis at Victoria University of Wellington, New Zealand.
- Vishalache, B. 2010. "The Development of Moral Education in Malaysia". *Asia Pacific Journal of Educators and Education*. Vol. 25, 89–101
- Zarin, Ismail. 1990. *Masalah pengajaran Pendidikan Moral KBSM Tingkatan 1: Latihan Ilmiah*. Universiti Kebangsaan Malaysia.